



PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA
JL. IKAN BELIDA NO 46 PESAWAHAN TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG
Telepon: 0721 480999
Website: <https://bankswadaya.co.id/>, Email: swadayabpr@gmail.com

Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2025
PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA tahun 2025 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 27 April 2026

PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA

Yang Menyatakan,

Yulianus Sudarmanto
Direktur Utama

Oktonus
Direksi

Mengetahui

Chandra Ardianto
Komisaris Utama

Yono Wiryo
Komisaris

SURAT PENGANTAR

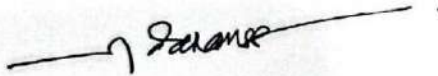
Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
Komp. Patra II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih-Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-4261445

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*codeofconduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Maka bersama ini kami kirimkan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Swadaya Anugerah Utama tahun 2025.

Bandar Lampung, 27 April 2026
Disetujui dan Ditandatangani Oleh,



Yulianus Sudarmanto
Direktur Utama

Nomor : 013/BSAU/IV/2026
Tanggal : 27 April 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Yth, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Lampung
Jl. Way Sekampung No 09
Lampung 35214

Perihal : **Penyampaian Laporan Tahunan PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA Tahun 2025** -

Referensi:

1. POJK No. 23 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. SEOJK No. 16/SEOJK.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) Bagi Bank Perekonomian Rakyat

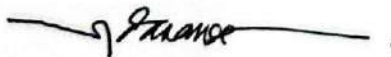
Menunjuk perihal dan referensi di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA Tahun 2025 yang terdiri atas:

1. **Laporan Tahunan**
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPRS, antara lain Laporan Keuangan Tahunan dan Informasi Lainnya
2. **Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola**
Data dan/atau informasi yang dilaporkan sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS, antara lain ringkasan hasil penilaian sendiri atas tata kelola BPR, kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA

Hormat Kami



Yulianus Sudarmanto
Direktur Utama


Oktonus
Direktur

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SWADAYA ANUGERAH
UTAMA TAHUN 2025



JL. IKAN BELIDA NO 46 PESAWAHAN TELUK BETUNG
BANDAR LAMPUNG
TELEPON: 0721 480999

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Swadaya Anugerah Utama
Alamat	Jalan Ikan Belida No.46 Pesawahan Teluk Betung Selatan
Nomor Telepon	(0721) 480-999

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Swadaya Anugerah Utama pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih. BPR Swadaya Anugerah Utama memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Swadaya Anugerah Utama dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Swadaya Anugerah Utama didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Swadaya Anugerah Utama.

BPR Swadaya Anugerah Utama telah beroperasi lebih dari 10 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Swadaya Anugerah Utama selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Swadaya Anugerah Utama terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Yulianus Sudarmanto
	Jabatan	Direktur Utama Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	NIK	1871125004970002

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung jawab Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sbb :

1. Menetapkan arah strategis dan kebijakan Bank.
2. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan.
4. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
5. Mendorong budaya kepatuhan dan integritas di seluruh organisasi.
6. Menyetujui dan menindaklanjuti laporan Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
7. Menyusun dan/atau menyetujui kebijakan sistem kepatuhan internal.
8. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko kepatuhan.
9. Menindaklanjuti hasil audit, pengawasan regulator, dan temuan internal.
10. Mengawasi pelaksanaan sistem manajemen risiko, APUPPT dan anti fraud.
11. Pemantauan Penerapan SOP
12. Meninjau efektivitas SOP
13. Memberi masukan perbaikan SOP
14. Mengawasi Pelaporan Kepatuhan yang dikirim kepada regulator dikirim tepat waktu dalam rangka meningkatkan integritas pelaporan keuangan.
15. Menangani pelaporan pelanggaran (whistleblowing).
16. Menindaklanjuti potensi fraud atau temuan audit.
17. Mengkoordinasi pelatihan kepatuhan untuk seluruh karyawan.
18. Mengembangkan budaya kepatuhan dan integritas.
19. Bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
20. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
21. Direksi wajib menindaklanjuti :
 - a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan
 - b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
22. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
23. Anggota Direksi yang berhalangan hadir, wajib digantikan oleh anggota Direksi lainnya yang hadir, kecuali terhadap hal-hal yang memang tidak dapat digantikan maka harus anggota Direksi tersebut yang wajib menghadirinya secara pribadi.

Wewenang Direktur Utama YMFK :

1. Mengambil keputusan strategis dalam batas kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Menyetujui kebijakan operasional dan prosedur kerja Bank.
3. Menugaskan dan mengevaluasi pejabat fungsi kepatuhan.
4. Menyetujui tindakan korektif atas pelanggaran yang ditemukan oleh satuan kerja kepatuhan.
5. Mewakili manajemen dalam berkoordinasi dengan OJK terkait hal-hal kepatuhan.
6. Mengakses seluruh data dan dokumen Bank yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepatuhan.
7. Memberikan teguran atau rekomendasi perbaikan atas pelanggaran kepatuhan.
8. Menyetujui atau merekomendasikan kebijakan internal terkait risiko kepatuhan.

2.	Nama	Oktonus
	Jabatan	Direktur Bisnis
	NIK	1871125004970005

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**Tugas dan Tanggung jawab Direktur Bisnis sbb :**

1. Direktur Bisnis bertanggung jawab atas strategi dan pengelolaan bisnis Bank.
2. Merancang dan mengeksekusi strategi pemasaran dan strategi penyaluran kredit.
3. Meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit UMKM.
4. Terhadap portofolio kredit, memastikan penyaluran kredit berkualitas dan sesuai target.
5. Mengawasi rasio NPL dan kolektibilitas kredit agar tetap sehat.
6. Mengembangkan produk dari Bank Swadaya yang sesuai kebutuhan masyarakat/konsumen
7. Mendorong transformasi digital layanan bisnis.
8. Terhadap Kinerja SDM bisnis turut memonitor kinerja antar divisi (front office dan back office).
9. Memberikan pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi SDM bisnis.
10. Bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
11. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
12. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
13. Direksi wajib menindaklanjuti :
 - a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan
 - b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
14. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
15. Anggota Direksi yang berhalangan hadir, wajib digantikan oleh anggota Direksi lainnya yang hadir, kecuali terhadap hal-hal yang memang tidak dapat digantikan maka harus anggota Direksi tersebut yang wajib menghadirinya secara pribadi.

Wewenang Direktur Bisnis :

1. Kewenangan Operasional
Menyetujui strategi pemasaran, promosi produk, pemberian kredit dalam batas kewenangan.
2. Akses terhadap Informasi
Memiliki hak akses penuh terhadap data unit bisnis dan berwenang meminta laporan.
3. Penetapan Kebijakan Bisnis
Menyusun dan merekomendasikan kebijakan kredit dan operasional kepada Direksi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Chandra Ardianto
	Jabatan	Komisaris Utama
	NIK	3504112701860001

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**Tanggung jawab Komisaris Utama :**

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Memimpin rapat Dewan Komisaris dan memastikan efektivitas proses pengambilan keputusan;
3. Mengawasi kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan strategis;
5. Menjaga independensi dan objektivitas Dewan Komisaris;
6. Mengawasi penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
7. Melakukan evaluasi atas kinerja Direksi;
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada RUPS.

Wewenang Komisaris Utama :

1. Pengawasan terhadap Direksi
 - a. Meminta penjelasan dan informasi dari Direksi;
 - b. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi;
 - c. Memberikan arahan atau catatan perbaikan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai.
2. Akses Informasi dan Rapat
 - a. Mengakses dokumen dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memimpin dan mengatur jadwal rapat;
 - c. Mengundang pihak terkait untuk hadir dalam rapat.
3. Penunjukan dan Evaluasi
 - a. Mengusulkan agenda evaluasi kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris;

b. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai pencalonan, pengangkatan, atau pemberhentian Direksi.

2.	Nama	Yono Wiryo
	Jabatan	Komisaris
	NIK	1871121906640003

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tanggung jawab Komisaris :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Memimpin rapat Dewan Komisaris dan memastikan efektivitas proses pengambilan keputusan;
3. Mengawasi kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan strategis;
5. Menjaga independensi dan objektivitas Dewan Komisaris;
6. Mengawasi penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
7. Melakukan evaluasi atas kinerja Direksi;
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris :

1. Pengawasan terhadap Direksi
 - a. Meminta penjelasan dan informasi dari Direksi;
 - b. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi;
 - c. Memberikan arahan atau catatan perbaikan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai.
2. Akses Informasi dan Rapat
 - a. Mengakses dokumen dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memimpin dan mengatur jadwal rapat;
 - c. Mengundang pihak terkait untuk hadir dalam rapat.
3. Penunjukan dan Evaluasi
 - a. Mengusulkan agenda evaluasi kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris;
 - b. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai pencalonan, pengangkatan, atau pemberhentian Direksi.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Memastikan kebijakan yang diambil oleh Direksi sesuai dengan ketentuan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

1.	Komite	01. Komite Audit
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	nihil
	Jumlah Rapat	0

	Program Kerja Komite: Nihil Realisasi Program Kerja Komite: Nihil	
2.	Komite	02. Komite Pemantau Risiko
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	nihil
	Jumlah Rapat	0
	Program Kerja Komite: Nihil Realisasi Program Kerja Komite: Nihil	
3.	Komite	03. Komite Remunerasi dan Nominasi
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	nihil
	Jumlah Rapat	0
	Program Kerja Komite: Nihil Realisasi Program Kerja Komite: Nihil	
4.	Komite	04. Komite Manajemen Risiko
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	nihil
	Jumlah Rapat	0
	Program Kerja Komite: Nihil Realisasi Program Kerja Komite: Nihil	
5.	Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite: Tidak memiliki anggota komite.	

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Chandra Ardianto
	NIK	3504112701860001
	Persentase Kepemilikan (%)	30,00

1. Tidak ada kepemilikan saham untuk anggota direksi
2. Terdapat Kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris sebesar 30%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Yulianus Sudarmanto
	NIK	1871125004970002
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Oktonus
	NIK	1871125004970005
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Chandra Ardianto
----	------	------------------

	NIK	3504112701860001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	30%
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20%
2.	Nama	Yono Wiryo
	NIK	1871121906640003
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat kepemilikan saham oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang saham pengendali pada kelompok usaha BPR.

3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Chandra Ardianto
	NIK	3504112701860001
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BPR CIPTA DANA MULIA
	Persentase Kepemilikan (%)	2,14 %

1. Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lain
2. Terdapat Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain sebesar 2.14%

4. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Yulianus Sudarmanto
	NIK	1871125004970002

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Oktonus
	NIK	1871125004970005
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Chandra Ardianto
	NIK	3504112701860001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yono Wiryo
	NIK	1871121906640003
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

tidak ada hubungan keuangan terhadap pengurus BPR

5. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Yulianus Sudarmanto
	NIK	1871125004970002
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Oktonus
	NIK	1871125004970005
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Chandra Ardianto
	NIK	3504112701860001
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yono Wiryo
	NIK	1871121906640003

Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

tidak ad hubungan keluarga kepada pengurus

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp144.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp138.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp126.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp138.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp622.346.160
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp462.200.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

1. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa Kepesertaan BPJS Kesehatan
2. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa Tunjangan Operasional

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	4,45 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,48 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,78 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,17 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,36 : 1

Penjelasan untuk rasio gaji sbb :

==> Keterangan Perbandingan (a/b) : 1

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 4.45 : 1
2. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi terendah (b) 1.48 : 1
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah (b) 1.78 : 1
4. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) 1.17 : 1
5. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) 3.36 : 1

8. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	08 Februari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi Agenda :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi target VS realisasi RBB 2025 bulan Januari 2025 serta rencana tindak utk pencapaian. Prioritas utama target yg harus dicapai adalah NPL & KYD. 2. Menunjuk PIC monitoring RBB 2025 3. Menegaskan kembali arah & kebijakan BSAU dalam pemberian kredit kepada sektor 		

1.	UMKM dengan plafon < 750 juta. 4. Melakukan review penilaian KPI yaitu reward & Punishment untuk tenaga pemasaran (AO & marketing) serta bagian remedial. 5. Mereview kerjasama dg lawyer Roby Octora , SH 6. Rencana penjualan aset hapus buku an. Ratnawati & Rahmawati. 7. Proses PN debitor an.H Risman 8. Lain2	
2.	Tanggal Rapat	21 Maret 2025
2.	Jumlah Peserta	3 orang
2.	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi Agenda : 1. Mengusulkan Renovasi Gedung/penambahan ruangan di Lt4 2. Membahas komposisi dan penghitungan reward & Punishment bagi AO 3. Membahas ketentuan baru SEOJK NO.2/SEOJK.03/2025 tentang KPMM 4. Upaya peningkatan dana yg berasal dari tabungan 5. Rencana tindak meningkatkan jumlah modal inti (dampak dari pemberlakuan CKPN PPKA) 6. Rencana tindak utk menghadapi libur panjang +/- 11 hari libur (28 mrt sd 7 April) 7. Lain2	
3.	Tanggal Rapat	04 September 2025
3.	Jumlah Peserta	3 orang
3.	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi Agenda : 1. Evaluasi & Rencana Tindak Pencapaian RBB 2025 2. Dampak Pemberlakuan CKPN terhadap modal inti 3. Pentingnya Budaya Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Pengendalian internal BSAU 4. Lain2	
4.	Tanggal Rapat	09 Oktober 2025
4.	Jumlah Peserta	3 orang
4.	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi Agenda : 1. Melakukan evaluasi kinerja terhadap target VS realisasi RBB 2025 bulan September 2025. 2. Prioritas utama target yg harus dicapai adalah NPL & Pertumbuhan KYD. 3. Evaluasi Program S3 (September Suka Suka) 4. Rencana buka pos untuk penyaluran kredit 5. Lain2	
5.	Tanggal Rapat	05 Desember 2025

	Jumlah Peserta	8 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Direksi Agenda : 1. Pembahasan Rencana Bisnis BPR Th 2026 Pemaparan strategi <ul style="list-style-type: none"> • bisnis • Teknis eksekusi RBB • Rencana strategis KYD 80% dan Simpanan 20% Lain2	
6.	Tanggal Rapat	08 Februari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris Agenda : 1. Melakukan evaluasi target VS realisasi RBB 2025 bulan Januari 2025 serta rencana tindak utk pencapaian. Prioritas utama target yg harus dicapai adalah NPL & KYD. 2. Menunjuk PIC monitoring RBB 2025 3. Menegaskan kembali arah & kebijakan BSAU dalam pemberian kredit kepada sektor UMKM dengan plafon < 750 juta. 4. Melakukan review penilaian KPI yaitu reward & Punishment untuk tenaga pemasaran (AO & marketing) serta bagian remedial. 5. Mereview kerjasama dg lawyer Roby Octora , SH 6. Rencana penjualan aset hapus buku an. Ratnawati & Rahmawati. 7. Proses PN debitur an.H Risman 8. Lain2	
7.	Tanggal Rapat	18 Februari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris Agenda : 1. Mensosialisasikan ketentuan OJK Nomor 1 tahun 2024 tentang kuliatas aset BPR 2. Memberikan arahan kepada Direksi tentang POJK No.1 tahun 2024 untuk dapat mengelola aset produktif BPR sesuai dengan ketentuan. 3. Lain2	
8.	Tanggal Rapat	04 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris Agenda : 1. Mensosialisasikan ketentuan OJK Nomor 9 tahun 2024 tentang kuliatas aset BPR 2. Memberikan arahan kepada Direksi tentang POJK No.1 tahun 2024 untuk dapat	

	mengelola aset produktif BPR sesuai dengan ketentuan. 3. Lain2	
9.	Tanggal Rapat	21 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris Agenda : 1. Membahas komposisi dan penghitungan reward & Punishment bagi AO 2. Membahas ketentuan baru SEOJK NO.2/SEOJK.03/2025 tentang KPMM 3. Lain2	
10.	Tanggal Rapat	10 Juli 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris Agenda : 1. Pembahasan evaluasi realisasi RBB semester 1 tahun 2025 2. Lain2	
11.	Tanggal Rapat	09 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris Agenda : 1. Evaluasi kinerja terhadap target VS realisasi RBB 2025 bulan September 2025. 2. Mengingatkan kepada Direksi ttg Skala Prioritas antara penyelesaian NPL & Pertumbuhan KYD. 3. Evaluasi Program S3 (September Suka Suka) 4. Rencana buka pos untuk penyaluran kredit 5. Lain2	
12.	Tanggal Rapat	05 Desember 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Dewan Komisaris Agenda : 1. Pembahasan Rencana Bisnis BPR Th 2026 Pemaparan strategi <ul style="list-style-type: none"> • bisnis • Teknis eksekusi RBB • Rencana strategis KYD 80% dan Simpanan 20% 1. Lain2	

13.	Tanggal Rapat	05 Mei 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
Topik/Materi Pembahasan: Memo Internal Dewan Komisaris kepada Direksi Perihal : Penilaian Kinerja Karyawan & Penerapan Sistem Reward dan Punishment		
14.	Tanggal Rapat	12 Juni 2026
	Jumlah Peserta	1 orang
Topik/Materi Pembahasan: Memo Internal Dewan Komisaris kepada Direksi Perihal : Kepatuhan terhadap SOP Kredit		

Pelaksanaan rapat dalam 1 tahun yaitu :

1. Rapat Direksi 5 kali.
2. Rapar Dewan Komisaris 7 kali dan Memo Internal Dewan Komisaris 2 kali.

9. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Chandra Ardianto
	NIK	3504112701860001
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	9 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Kehadiran anggota dewan komisaris selama tahun 2025 mengikuti rapat 9 kali.

10. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

nihil

11. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	7 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Selama semester 1 tahun 2025 terdapat 7 kasus hukum perdata :

1. Nama Deb : FREDDI (Penggugat)
 Nomor Surat PN : 71/Pdt.G/2025 PN Tjk (GUGATAN PMH)
 Status = Sudah Putusan PN
2. Nama Deb : RISMAN YAHSAN (Termohon Eksekusi)
 Nomor Surat PN : 2/Pdt.Eks.HT/2025 PN Tjk (PERMOHONAN EKSEKUSI)
 Status = Sudah Putusan PN
3. Nama Deb : RISMAN YAHSAN (Pembantah Eksekusi)
 Nomor Surat PN : 118/Pdt.Bth/2025/PN Tjk (BANTAHAN EKSEKUSI)
 Status = Sudah Putusan PN
4. Nama Deb : FADI DJAENDAR MUDA SE (Termohon Eksekusi)
 Nomor Surat PN : 19/Pdt.Eks.HT.Aan/2025/PN.Tjk (PERMOHONAN EKSEKUSI)
 Status = Masih Proses Eksekusi
5. Nama Deb : FADI DJAENDAR MUDA SE (PENGGUGAT)
 Nomor Surat PN : 251/Pdt.G/2025/PN Tjk (GUGATAN PMH)
 Status = Masih Proses Eksekusi
6. Nama Deb : FAIK SUNGKAR (Termohon Eksekusi)
 Nomor Surat PN : 24/Pdt.Eks.HT.Aan/2025/PN Tjk (PERMOHONAN EKSEKUSI)
 Status = Masih Proses Eksekusi
7. Nama Deb : AGUS SUTIONO (Penggugat)
 Nomor Surat PN : 35/Pdt.G/2025/PN Met (GUGATAN PMH)
 Status = Sudah Putusan PN

12. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

13. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik


1.	Tanggal Pelaksanaan	10 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum dan Sekitar Kantor
	Penjelasan Kegiatan	Membagikan beras kepada masyarakat umum dan sekitarnya dan juga panti asuhan
	Jumlah (Rp)	Rp1.950.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 27 April 2026

PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA

Dibuat Oleh


Yulianus Sudarmanto
Direktur Utama

Disetujui Oleh


Chandra Ardianto
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anugerah Utama

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039723-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601111-30042026154624

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

accounting@bankswadaya.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-30 15:46:24



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.